

Katalog : 4102002.73

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2021



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2021

ISBN :
Katalog BPS : 4102002.73
Nomor Publikasi : 73000.2201
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 57 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Sampul :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Diterbitkan dan Dicitak Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi :
freepik.com, unsplash.com

***Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, dan/atau
Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa
Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.***

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2021**

Pengarah

Suntono

Penanggungjawab

Suri Handayani

Editor

Wuri Wahyuni

Penulis

Rosyita Darojati A'laa

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham Mubarak

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini memberikan gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota, disparitas pembangunan dari berbagai aspek dan isu terkait daya beli masyarakat.

Ada tiga pilihan paling mendasar pada pembangunan manusia yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

Semoga apa yang disampaikan pada publikasi ini dapat memberi nilai positif bagi setiap pengguna data dan mampu memperkaya khazanah pustaka BPS. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik di masa mendatang. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terimakasih.

Makassar, Januari 2022



Suntono

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

Daftar Isi

v	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
viii	DAFTAR GAMBAR
x	DAFTAR LAMPIRAN
1	BAB I
	PENDAHULUAN
3	1.1. Pengukuran Pembangunan Manusia
6	1.2. Indikator IPM Metode Baru
9	1.3. Penghitungan IPM Metode Baru
9	1.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia
10	1.5. Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia
11	BAB II
	PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
13	2.1. Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan
15	2.2. Status IPM Sulawesi Selatan
18	2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
29	BAB III
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
	CAPAIAN DAN TANTANGAN
31	3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan
33	3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan
33	3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi
35	BAB IV
	DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
37	4.1. Disparitas Antarindividu
37	4.2. Disparitas Antargender
39	4.3. Disparitas Antarwilayah
43	BAB V
	DAYA BELI MASYARAKAT
45	5.1. Isu Pelemahan Daya Beli
46	5.2. Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli
49	LAMPIRAN

Daftar Tabel

8	:	Tabel 1.1	Nilai Minimum dan Maximum IPM Metode Baru
14	:	Tabel 2.1	IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2021
15	:	Tabel 2.2	IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2020-2021
19	:	Tabel 2.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021
20	:	Tabel 2.4	Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021
22	:	Tabel 2.5	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Tahun)
24	:	Tabel 2.6	Harapan Lama Sekolah Menurut (HLS) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Tahun)
25	:	Tabel 2.7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Tahun)
27	:	Tabel 2.8	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Ribu Rupiah)
45	:	Tabel 5.1	Distribusi persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2018-Q3 2021 (persen)

Daftar Gambar

4	Gambar 1.1	Sejarah Pengukuran IPM
5	Gambar 1.2	Perubahan Pengukuran IPM
5	Gambar 1.3	Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru
8	Gambar 1.4	Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
9	Gambar 1.5	Rumus Perhitungan IPM Metode Baru
9	Gambar 1.6	Klasifikasi Capaian IPM
13	Gambar 2.1	Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional
14	Gambar 2.2	IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2021
16	Gambar 2.3	Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2015-2021
16	Gambar 2.4	Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2015-2021
17	Gambar 2.5	Tren Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2015-2021
18	Gambar 2.6	Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2015-2021
19	Gambar 2.7	Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IPM tertinggi dan terendah, 2020-2021
20	Gambar 2.8	Peta Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021
21	Gambar 2.9	Peta Tematik Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Tahun)
23	Gambar 2.10	Peta Tematik Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Tahun)
25	Gambar 2.11	Peta Tematik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Tahun)
26	Gambar 2.12	Peta Tematik Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Ribuan Rupiah)
31	Gambar 3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2021 (persen)
32	Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2021 (persen)
34	Gambar 3.3	Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2017-2021
34	Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus Tahun 2017-2021 (persen)

Daftar Gambar

- 37 : **Gambar 4.1** Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan
Maret 2017 - Maret 2021
- 38 : **Gambar 4.2** Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di
Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (Persen)
- 38 : **Gambar 4.3** Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di
Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (Persen)
- 39 : **Gambar 4.4** Selisih IPM Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto,
2015-2021
- 40 : **Gambar 4.5** Selisih Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Toraja
Utara dan Kabupaten Jeneponto, 2015-2021 (Tahun)
- 40 : **Gambar 4.6** Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto,
2015-2021 (Tahun)
- 41 : **Gambar 4.7** Selisih Pendapatan Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota
Makassar dan Kabupaten Tana Toraja, 2015-2021 (Ribu
Rupiah)
- 46 : **Gambar 5.1** Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sulawesi
Selatan (y-on-y), 2020-2021
- 46 : **Gambar 5.2** Laju Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan, 2015-
2021
- 47 : **Gambar 5.3** Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan,
2021

Daftar Lampiran

- 51 : Lampiran 1 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Tahun)
- 52 : Lampiran 2 Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Tahun)
- 53 : Lampiran 3 Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Tahun)
- 54 : Lampiran 4 Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Ribu Rupiah)
- 55 : Lampiran 5 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021
- 56 : Lampiran 6 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2014-2021
- 57 : Lampiran 7 Tren Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2020-2021

BAB I

Pendahuluan

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB I

Pendahuluan

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberadaan manusia sebagai pelaku pembangunan tidak dapat dikesampingkan sebagai faktor utama, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

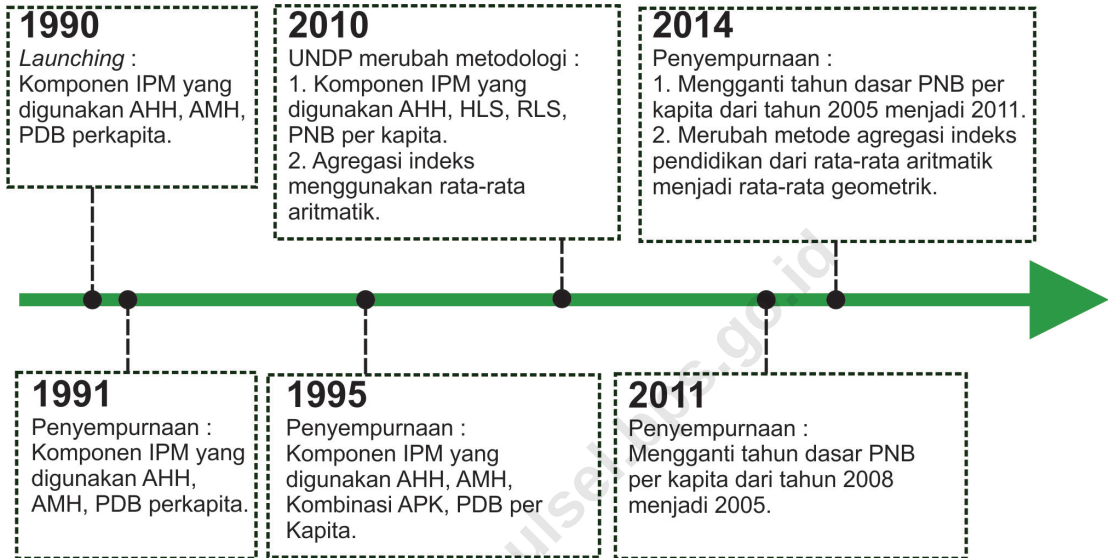
Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Oleh karena itulah konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki konsep pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat meliputi: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia (BPS, 2017).

1.1. Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator

pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990, laporan pembangunan manusia telah dikembangkan, dan yang terakhir penyempurnaan penyusunan IPM menggunakan metode baru pada tahun 2014. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Adapun metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011,
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik

1990	2010
DIMENSI/INDIKATOR	DIMENSI/INDIKATOR
A. Kesehatan : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	A. Kesehatan : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
B. Pendidikan	B. Pendidikan
C. Angka Melek Huruf (AMH)	C. Harapan Lama Sekolah (HLS)
D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
E. Standar Hidup: PDB perkapita	E. Standar Hidup: PNB perkapita
AGREGASI INDEKS	AGREGASI INDEKS
Rata-rata Hitung	Rata-rata ukur/Geometrik

Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Adapun indikator yang berubah, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Perubahan metode penghitungan IPM menghasilkan nilai IPM yang lebih sempurna dibanding IPM metode sebelumnya. Keunggulan IPM metode baru adalah karena menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih

Metode Lama	Metode Baru
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 th +	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
Rata-rata Hitung	Rata-rata Geometrik
Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, PNB yang menggantikan PDB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Penambahan komoditas yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan menghasilkan nilai yang lebih baik.

Keuntungan lainnya adalah dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.2. Indikator IPM Metode Baru

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Dasar penghitungan UHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah}$$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK = Faktor Koreksi Pesantren

E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t

i = Penduduk usia (a,a+1,...,n)

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana share 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan share sebesar 73,63 persen.



Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
 Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Untuk menghitung nilai dari masing-masing indeks pembentuk IPM, UNDP telah menetapkan batas minimum dan batas maksimum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990, batas diperoleh dari hasil observasi, sedangkan pada tahun 1994 menggunakan suatu nilai batas tertentu. Mulai tahun 2010, penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Batas minimum pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten pada tahun 2010. Angka tersebut merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (Rp)

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

1.3. Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan di atas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

1.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia

Dalam upaya untuk membandingkan antar wilayah, dibentuklah klasifikasi IPM. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



Gambar 1.6 Klasifikasi Capaian IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

1.5. Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, dan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun ke t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun ke t-1

BAB II

Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

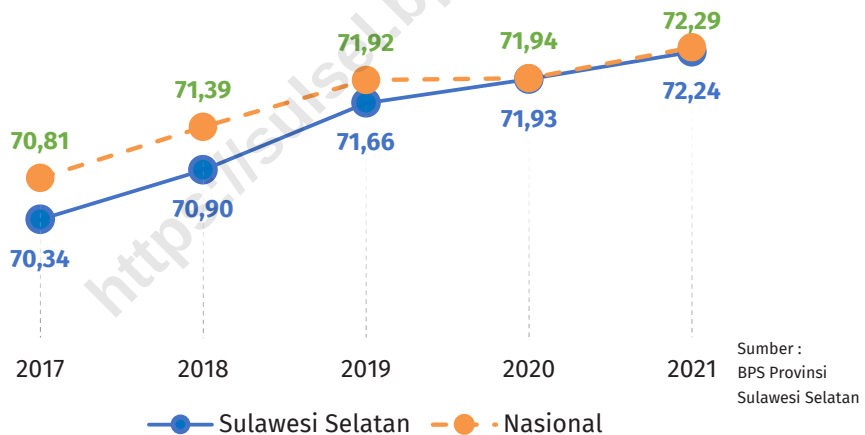
BAB II

Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

2.1. Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil perhitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 72,24 dan secara nasional berada pada peringkat 11, memiliki peringkat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dengan nilai IPM pada tahun 2020 sebesar 71,93. Sejak tahun 2017, pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah berstatus tinggi.

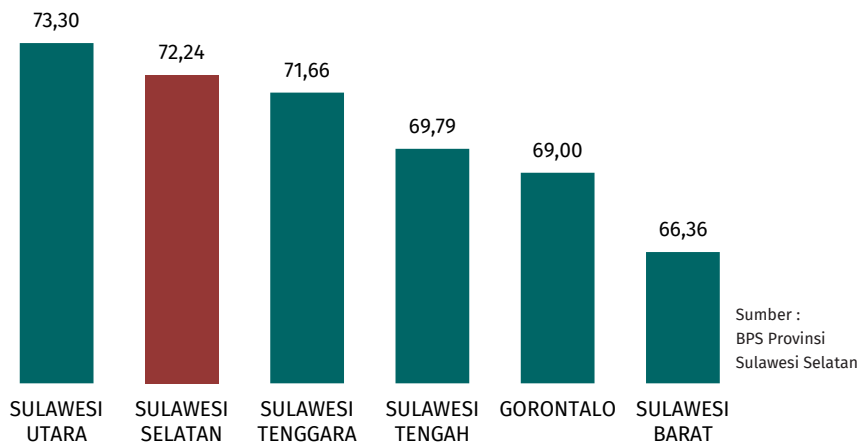
Selama periode 2017 hingga 2021 angka IPM Sulawesi Selatan masih dibawah IPM nasional. Seperti halnya IPM nasional, IPM Sulawesi Selatan setiap tahun, selalu mengalami peningkatan.



Gambar 2.1 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional

Pulau Sulawesi terbagi menjadi 6 Provinsi dengan angka IPM Sulawesi Selatan berada pada posisi ke-2 setelah IPM Sulawesi Utara. Sejak periode 2010 hingga 2021 capaian IPM tertinggi di pulau Sulawesi dicapai oleh Sulawesi Utara. Pada tahun 2021 IPM Sulawesi Utara mencapai 73,30, kemudian pada posisi kedua adalah Sulawesi Selatan dengan capaian IPM sebesar 72,24 dan pada posisi ketiga adalah Sulawesi Tenggara dengan capaian IPM sebesar 71,66.

Pada tahun 2021 provinsi di pulau Sulawesi ada tiga provinsi yang mencapai status pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat masih mencapai kategori “sedang”.



Gambar 2.2 IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2021

Tabel 2.1 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2021

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	IPM
Sulawesi Utara	71,76	12,94	9,62	10.882	73,30
Sulawesi Tengah	68,83	13,23	8,89	9.378	69,79
Sulawesi Selatan	70,66	13,52	8,46	11.184	72,24
Sulawesi Tenggara	71,27	13,68	9,13	9.381	71,66
Gorontalo	68,19	13,11	7,90	10.157	69,00
Sulawesi Barat	65,25	12,86	7,96	9.153	66,36
Indonesia	71,57	13,08	8,54	11.156	72,29

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Selisih capaian IPM Sulawesi Utara dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 1,06 poin. Perbedaan ini disebabkan perbedaan capaian komponen IPM Sulawesi Selatan dengan provinsi tersebut. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, secara komponen, Sulawesi Selatan unggul pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara Sulawesi Utara lebih unggul pada komponen Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

UHH Sulawesi Selatan lebih rendah 1,10 tahun dibandingkan Sulawesi Utara. Jika di Sulawesi Selatan, bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 70,66 tahun, di Sulawesi Utara bayi baru lahir memiliki harapan hidup lebih panjang hingga usia 71,76 tahun. Pada bidang Pendidikan, Sulawesi Selatan memiliki level yang berbeda dengan Sulawesi Utara. Penduduk usia 7 tahun di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan SMA (12,94 tahun untuk Sulawesi Utara dan 13,52 untuk Sulawesi Selatan). Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun

ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yaitu 1,16 tahun. Sulawesi Utara memiliki rata-rata lama sekolah selama 9,62 tahun sementara di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,46 tahun. Untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Sulawesi Selatan lebih tinggi dibanding Sulawesi Utara.

2.2. Status IPM Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 72,24. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Tabel 2.2 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2020-2021

Komponen	2020	2021
Umur Harapan Hidup (tahun)	70,57	70,66
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,38	8,46
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,45	13,52
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun (PPP))	11,08	11,18
Indeks Pembangunan Manusia	71,93	72,24

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

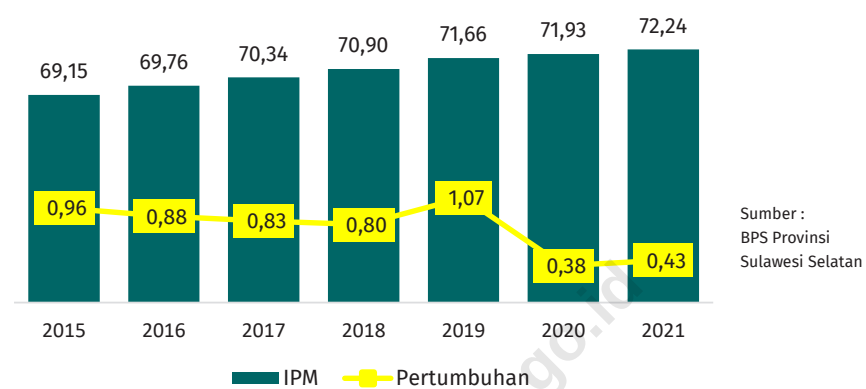
Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Saat ini, umur harapan hidup lahir di Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,66 tahun dengan kata lain harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun 2021 dapat bertahan hidup hingga usia 70,66 tahun.

Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,46 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 1 hingga kelas 3 SMP. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun mulai bersekolah, mempunyai harapan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,52 tahun atau setara tamat SMA hingga Diploma I/II. Standar hidup layak Sulawesi Selatan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan sudah mencapai 11,18 juta per kapita per tahun.

Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Sulawesi Selatan. Dilihat dari trennya, IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan. Dalam lima tahun saja (2017-2021), terjadi kenaikan 1,90 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Secara tren pada periode 2015-2018 dan 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan angka IPM, namun pada tahun 2019 mengalami percepatan pertumbuhan kembali begitu pula pada tahun 2021.

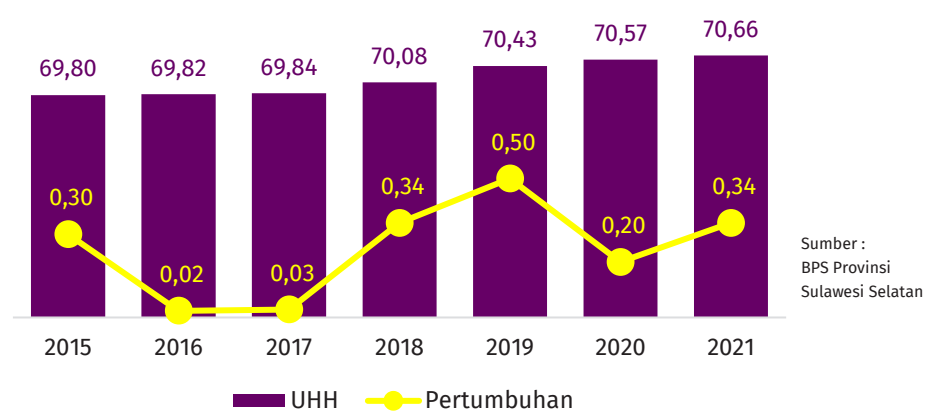


Gambar 2.3 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2015-2021

Dimensi Kesehatan

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2015 – 2021 cenderung stabil pada kisaran 70 tahun dan meningkat setiap tahunnya.

Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Sulawesi Selatan.

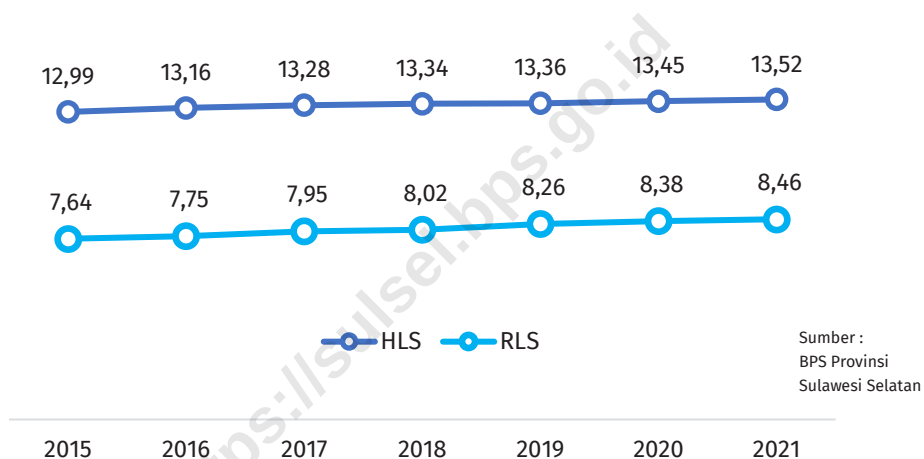


Gambar 2.4 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2015-2021

Dimensi Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

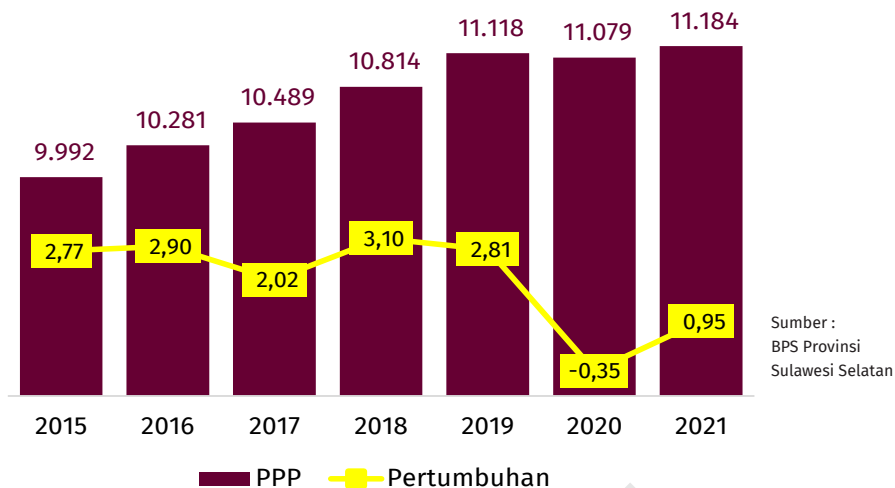
Pada periode tahun 2015-2021, tren Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,52 persen. Sedangkan tren rata-rata lama sekolah mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode yang sama. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,95 persen.



Gambar 2.5 Tren Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2015-2021

Standar Hidup Layak

Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Tahun 2020 dan 2021, pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan tumbuh lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 0,95 persen. Jika pada tahun 2015 pengeluaran per kapita penduduk berkisar sekitar 9,99 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2021 telah mencapai 11,18 juta rupiah per tahun.



Gambar 2.6 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2015-2021

2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, IPM tertinggi untuk level kabupaten/kota dicapai oleh Kota Makassar sebesar 82,66. Kemudian disusul oleh Kota Palopo (78,38) dan Kota Parepare (78,21). Tiga wilayah kota di Sulawesi Selatan ini menunjukkan capaian IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten lainnya.

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Sedangkan untuk capaian IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto (64,56), Kabupaten Bone (66,40), dan Kabupaten Takalar (67,72).

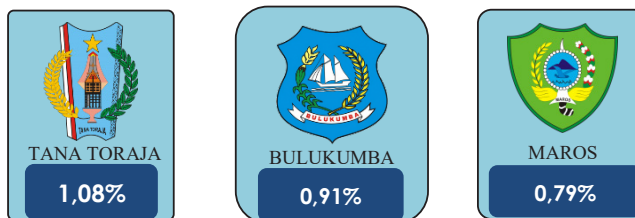
Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Selama periode 2020-2021, Kabupaten Tana Toraja menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,08 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 0,91 persen dan Kabupaten Maros sebesar 0,79 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,16 persen, kemudian Barru sebesar 0,18 persen, Kabupaten Enrekang dan Gowa sebesar 0,21 persen.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021

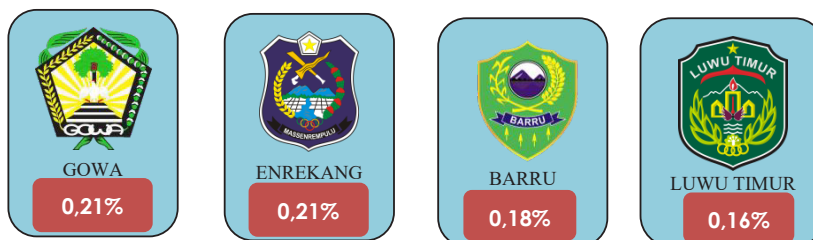
Kabupaten/Kota	IPM		
	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Selayar	67,38	67,76	0,56
Bulukumba	68,99	69,62	0,91
Bantaeng	68,73	68,99	0,38
Jeneponto	64,26	64,56	0,47
Takalar	67,31	67,72	0,61
Gowa	70,14	70,29	0,21
Sinjai	67,60	67,75	0,22
Maros	69,86	70,41	0,79
Pangkajene Kepulauan	68,72	69,21	0,71
Barru	71,00	71,13	0,18
Bone	66,06	66,40	0,51
Soppeng	68,67	68,99	0,47
Wajo	69,15	69,62	0,68
Sidenreng Rappang	71,21	71,54	0,46
Pinrang	71,26	71,45	0,27
Enrekang	72,76	72,91	0,21
Luwu	70,51	70,85	0,48
Tana Toraja	68,75	69,49	1,08
Luwu Utara	69,57	70,02	0,65
Luwu Timur	73,22	73,34	0,16
Toraja Utara	69,33	69,75	0,61
Makasar	82,25	82,66	0,50
Pare Pare	77,86	78,21	0,45
Palopo	78,06	78,38	0,41
Sulawesi Selatan	71,93	72,24	0,43

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota **TERTINGGI** , 2020-2021

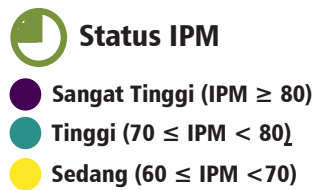


Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota **TERENDAH** , 2020-2021



Sumber :
BPS Provinsi
Sulawesi Selatan

Gambar 2.7 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan IPM tertinggi dan terendah, 2020-2021



Sumber :
BPS Provinsi
Sulawesi Selatan

Gambar 2.8 Peta Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021

Tabel 2.4 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021

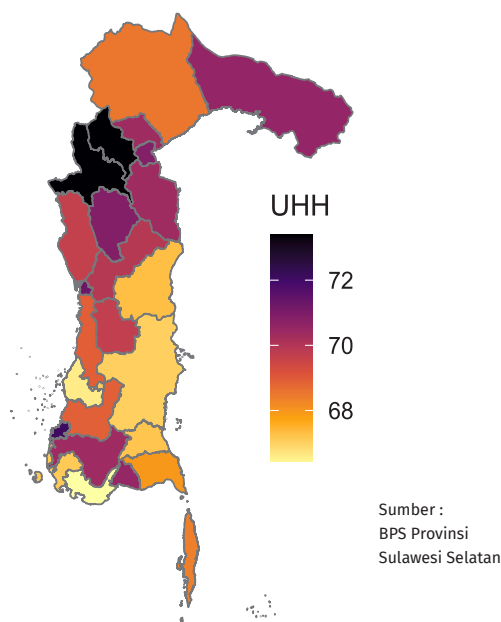
Kabupaten/Kota	Status Pembangunan Manusia	
	2020	2021
Selayar	Sedang	Sedang
Bulukumba	Sedang	Sedang
Bantaeng	Sedang	Sedang
Jeneponto	Sedang	Sedang
Takalar	Sedang	Sedang
Gowa	Tinggi	Tinggi
Sinjai	Sedang	Sedang
Maros	Sedang	Tinggi
Pangkajene Kepulauan	Sedang	Sedang
Barru	Tinggi	Tinggi
Bone	Sedang	Sedang
Soppeng	Sedang	Sedang
Wajo	Sedang	Sedang
Sidenreng Rappang	Tinggi	Tinggi
Pinrang	Tinggi	Tinggi
Enrekang	Tinggi	Tinggi
Luwu	Tinggi	Tinggi
Tana Toraja	Sedang	Sedang
Luwu Utara	Sedang	Tinggi
Luwu Timur	Tinggi	Tinggi
Toraja Utara	Sedang	Sedang
Makasar	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pare Pare	Tinggi	Tinggi
Palopo	Tinggi	Tinggi
Sulawesi Selatan	Tinggi	Tinggi

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Selama periode tahun 2020-2021 terdapat 2 kabupaten yang mengalami perubahan status. Kabupaten yang mengalami perubahan status dari sedang ke tinggi adalah Kabupaten Maros dan Luwu Utara. Mayoritas status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih pada kategori sedang. Sebanyak 12 kabupaten yang berstatus sedang yaitu, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto. Kabupaten/kota yang berstatus tinggi sebanyak 11 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Gowa, Kota Pare-pare dan Kota Palopo. Satu-satunya kota yang berstatus IPM sangat tinggi dicapai oleh Kota Makassar.

Capaian Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Terdapat 13 kabupaten yang mampu mencapai Pertumbuhan UHH lebih tinggi dari UHH Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba (0,27 persen), Kabupaten Sidrap (0,26 persen), Kabupaten Luwu Utara (0,23 persen), Kabupaten Pinrang (0,23 persen), Kabupaten Soppeng (0,23 persen), Kabupaten Bone (0,21 persen), Kabupaten Wajo (0,19 persen), Kabupaten Pangkep (0,18 persen), Kabupaten Takalar (0,18 persen), Kabupaten Jeneponto (0,15 persen), Kabupaten Luwu (0,14 persen) dan Kabupaten Luwu Timur (0,14 persen), dan Kabupaten Tana Toraja (0,14 persen).



Gambar 2.9 Peta Tematik Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Tahun)

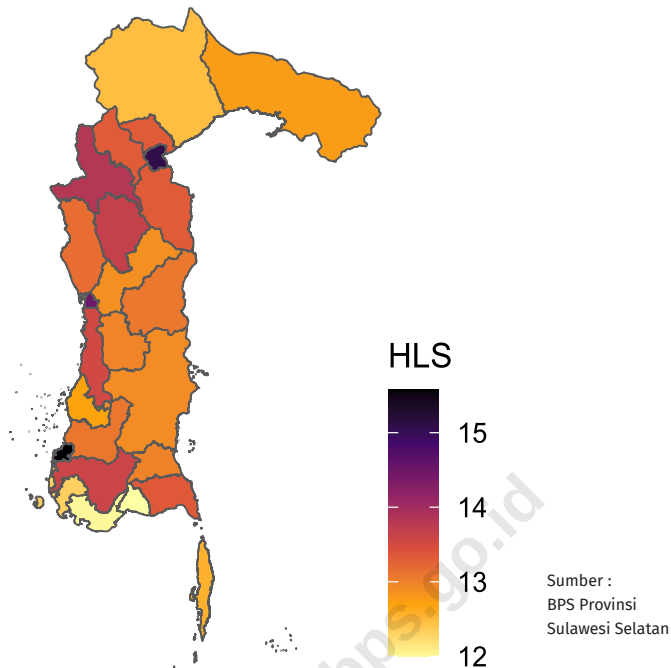
Tabel 2.5 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2019-2020 (Tahun)

Kabupaten/Kota	UHH		
	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Selayar	68,46	68,52	0,09
Bulukumba	67,92	68,10	0,27
Bantaeng	70,54	70,60	0,09
Jeneponto	66,39	66,49	0,15
Takalar	67,18	67,30	0,18
Gowa	70,43	70,45	0,03
Sinjai	67,30	67,38	0,12
Maros	69,02	69,04	0,03
Pangkajene Kepulauan	66,66	66,78	0,18
Barru	69,02	69,07	0,07
Bone	67,07	67,21	0,21
Soppeng	69,65	69,81	0,23
Wajo	67,35	67,48	0,19
Sidenreng Rappang	69,83	70,01	0,26
Pinrang	69,61	69,77	0,23
Enrekang	70,91	70,93	0,03
Luwu	70,34	70,44	0,14
Tana Toraja	73,30	73,40	0,14
Luwu Utara	68,51	68,67	0,23
Luwu Timur	70,53	70,63	0,14
Toraja Utara	73,39	73,41	0,03
Makasar	72,09	72,13	0,06
Pare Pare	71,27	71,31	0,06
Palopo	70,88	70,92	0,06
Sulawesi Selatan	70,57	70,66	0,13

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Sulawesi Selatan tahun 2021 meningkat sebesar 0,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 70,57 menjadi 70,66. Sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya lebih rendah pertumbuhannya dari pertumbuhan UHH Sulawesi Selatan.

Tidak berbeda dengan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan 2021 tumbuh sebesar 0,52 persen dari 13,45 menjadi 13,52 pada tahun 2021.



Gambar 2.10 Peta Tematik Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Tahun)

Terdapat 6 kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS nya lebih tinggi dibanding pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba sebesar 1,82 persen, Kabupaten Soppeng sebesar 1,16 persen, Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,13 persen, Kabupaten Jeneponto sebesar 1,00 persen, Kabupaten Maros sebesar 0,92 persen, dan Kabupaten Bone sebesar 0,78 persen.

Dari 24 kabupaten/kota terdapat 7 daerah yang mempunyai capaian HLS lebih tinggi dari HLS Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Tiga wilayah dengan HLS tertinggi dicapai oleh Kota Makassar sebesar 15,58 tahun, disusul oleh Kota Palopo sebesar 15,09 tahun, dan Kota Parepare sebesar 14,51 tahun.

Dimensi lain dari pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

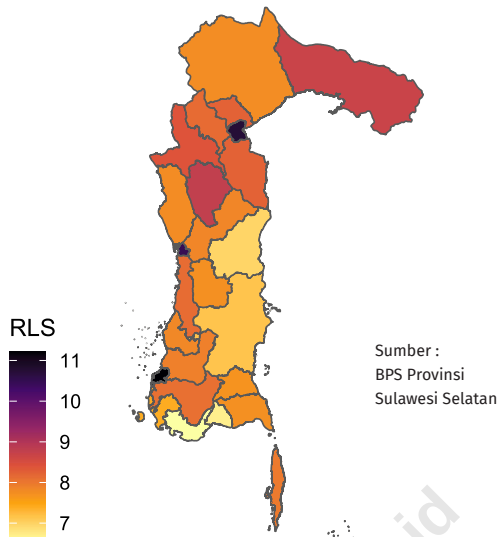
Tabel 2.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Tahun)

Kabupaten/Kota	HLS		
	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Selayar	12,65	12,66	0,08
Bulukumba	13,17	13,41	1,82
Bantaeng	12,04	12,05	0,08
Jeneponto	11,98	12,10	1,00
Takalar	12,41	12,42	0,08
Gowa	13,64	13,65	0,07
Sinjai	13,05	13,06	0,08
Maros	13,04	13,16	0,92
Pangkajene Kepulauan	12,76	12,77	0,08
Barru	13,58	13,59	0,07
Bone	12,88	12,98	0,78
Soppeng	12,90	13,05	1,16
Wajo	13,14	13,15	0,08
Sidenreng Rappang	12,94	12,95	0,08
Pinrang	13,23	13,24	0,08
Enrekang	13,70	13,71	0,07
Luwu	13,33	13,39	0,45
Tana Toraja	13,80	13,86	0,43
Luwu Utara	12,43	12,57	1,13
Luwu Timur	12,83	12,84	0,08
Toraja Utara	13,38	13,39	0,07
Makasar	15,57	15,58	0,06
Pare Pare	14,50	14,51	0,07
Palopo	15,08	15,09	0,07
Sulawesi Selatan	13,45	13,52	0,52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

Pada tahun 2021 RLS Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,95 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah 8,46 tahun atau setara dengan SMP kelas VIII. Pertumbuhan RLS tertinggi dicapai oleh Kabupaten Toraja utara (3,64 persen) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur dan Enrekang (0,11 persen).



Gambar 2.11 Peta Tematik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Tahun)

Tabel 2.7 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Tahun)

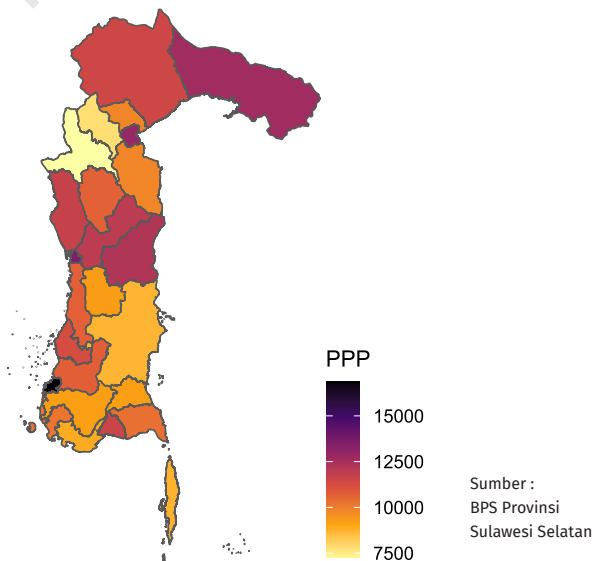
Kabupaten/Kota	RLS		
	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Selayar	7,88	8,08	2,54
Bulukumba	7,67	7,82	1,96
Bantaeng	6,72	6,77	0,74
Jeneponto	6,59	6,60	0,15
Takalar	7,29	7,49	2,74
Gowa	8,19	8,20	0,12
Sinjai	7,75	7,78	0,39
Maros	7,73	8,01	3,62
Pangkajene Kepulauan	7,66	7,92	3,39
Barru	8,23	8,24	0,12
Bone	7,15	7,23	1,12
Soppeng	7,81	7,82	0,13
Wajo	6,81	7,05	3,52
Sidenreng Rappang	7,84	7,94	1,28
Pinrang	7,86	7,87	0,13
Enrekang	8,90	8,91	0,11
Luwu	8,24	8,35	1,33
Tana Toraja	8,26	8,51	3,03
Luwu Utara	7,79	7,86	0,90
Luwu Timur	8,80	8,81	0,11
Toraja Utara	7,96	8,25	3,64
Makasar	11,21	11,43	1,96
Pare Pare	10,45	10,65	1,91
Palopo	10,76	10,94	1,67
Sulawesi Selatan	8,38	8,46	0,95

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Capaian RLS paling tinggi pada tahun 2021 adalah Kota Makassar sebesar 11,43 tahun. Dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 yaitu Kota Palopo (10,94) dan Kota Pare-pare (10,65). Artinya pada tiga kota ini rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah sampai dengan SMA kelas XI. Sedangkan RLS terendah pada tahun 2021 adalah Kabupaten Jeneponto yang mana capaian RLS mencapai 6,60. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto sampai dengan SMP kelas VII.

Dimensi pengeluaran ditunjukkan melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). PPP Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai Rp.11,08 juta (PPP per kapita per tahun) atau tumbuh sebesar 0,95 persen dibandingkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun sebelumnya. Artinya pengeluaran satu penduduk di Sulawesi Selatan selama satu tahun penuh adalah sekitar Rp 11,08 Juta pada tahun 2021. Pertumbuhan PPP paling tinggi adalah kabupaten Tana Toraja sebesar 3,01 persen. Adapun pertumbuhan PPP yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja Sebesar 0,46 persen.

Terdapat 10 kabupaten/kota yang capaian PPP tahun 2021 lebih tinggi dari PPP Sulawesi Selatan. PPP tertinggi dicapai oleh Kota Makassar sebesar 17,10 juta per kapita per tahun dengan pertumbuhan 1,33 persen. Disusul oleh Kota Pare-pare sebesar 13,79 juta per kapita per tahun dengan pertumbuhan sebesar 0,90 persen. Capaian PPP terendah dicapai oleh Tana Toraja yaitu sebesar 7,43 juta per kapita pertahun dengan pertumbuhan sebesar 3,01 persen.



Gambar 2.12 Peta Tematik Pengeluaran perkapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021 (Ribu Rupiah)

Tabel 2.8 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2020-2021 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Selayar	8.970	9.060	1,00
Bulukumba	10.513	10.632	1,13
Bantaeng	11.632	11.829	1,69
Jeneponto	9.114	9.215	1,11
Takalar	10.454	10.543	0,85
Gowa	9.394	9.504	1,17
Sinjai	9.439	9.505	0,70
Maros	10.963	11.032	0,63
Pangkajene Kepulauan	11.405	11.519	1,00
Barru	10.923	11.017	0,86
Bone	8.963	9.030	0,75
Soppeng	9.483	9.558	0,79
Wajo	12.386	12.505	0,96
Sidenreng Rappang	12.073	12.201	1,06
Pinrang	11.844	11.956	0,95
Enrekang	10.844	10.973	1,19
Luwu	10.014	10.116	1,02
Tana Toraja	7.217	7.434	3,01
Luwu Utara	11.562	11.736	1,50
Luwu Timur	12.814	12.886	0,56
Toraja Utara	8.097	8.134	0,46
Makasar	16.873	17.097	1,33
Pare Pare	13.663	13.786	0,90
Palopo	12.995	13.117	0,94
Sulawesi Selatan	11.079	11.184	0,95

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

BAB III

Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

BAB III

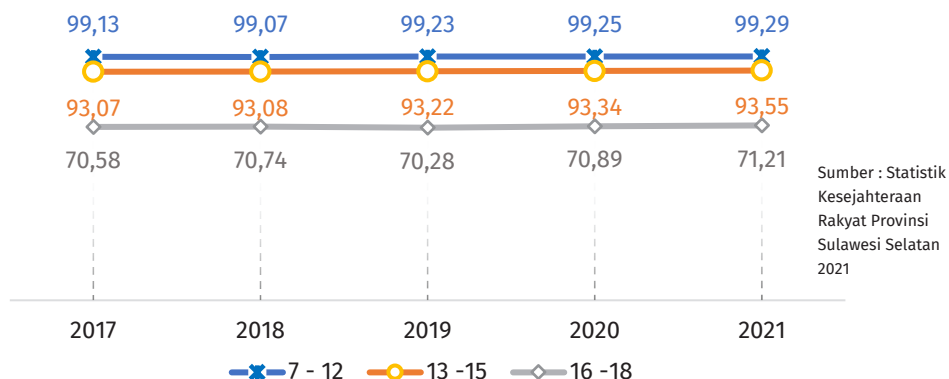
Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

Capaian dan Tantangan

3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, misalnya memperluas cakupan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah saat ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. Terdapat 4 upaya yang pemerintah coba kerjakan bersama dengan berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya dan keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen. Adanya krisis pandemi selama 2 tahun belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Namun dengan berbagai inovasi dan solusi yang coba dilakukan secara gotong royong, diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut guna mencapai tujuan membentuk SDM yang unggul untuk Indonesia maju kedepannya.

Pemerataan terhadap akses Pendidikan di suatu wilayah dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Penghitungan APS dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 Tahun), dan SLTA (16-18 Tahun).

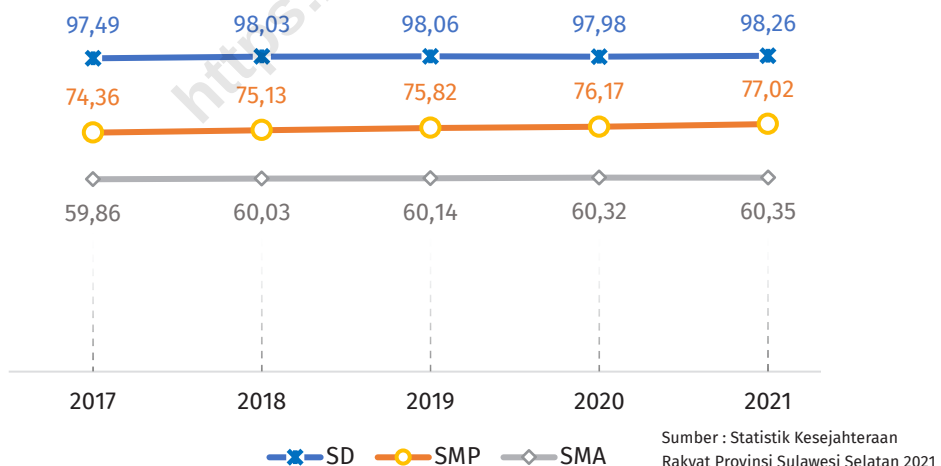


Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2021 (persen)

APS usia 7 – 12 tahun (setara SD/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencapai 99,29 persen. Artinya tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan SD di Sulawesi Selatan sudah cukup tinggi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,4 poin (2020 = 99,25 persen)

APS usia 13 – 15 tahun (setara SMP/ sederajat) di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai 93,55 persen lebih rendah daripada usia SD/ sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13 – 15 tahun juga mengalami kenaikan sebesar 0,21 poin (2020 = 93,34 persen) APS usia 16 – 18 tahun (setara SMA/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mencapai 71,21 persen. Angka ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7 – 12 tahun dan APS usia 13 – 15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16 – 18 tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin (2020 = 70,89 persen).

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur tersebut.



Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2021 (persen)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD menjadi yang paling tinggi dibandingkan dengan capaian APM pada jenjang SMP dan SMA. Tahun 2021 98,26 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ sederajat. Capaian APM SMP pada tahun 2021 sebesar 77,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 23 persen anak usia 13 – 15 tahun sedang tidak menempuh pendidikan pada jenjang SMP. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Sementara itu, APM SMA masih berada pada kisaran angka 60,35 persen atau meningkat 0,03 poin dari APM SMA tahun 2020.

3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

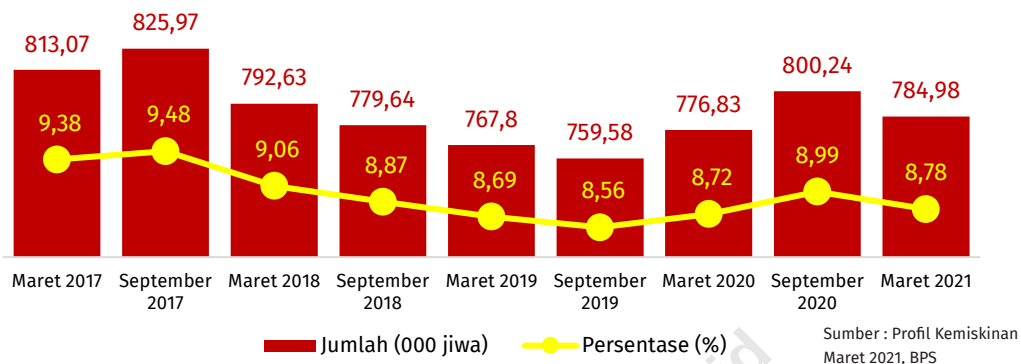
Pada tahun 2021 capaian umur harapan hidup (UHH) Sulawesi Selatan sebesar 70,66 tahun. Meningkat 0,13 persen dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Berdasarkan hasil olah Susenas diperoleh indikator yang mendukung peningkatan capaian UHH Sulawesi Selatan yaitu kondisi kesehatan ibu hamil termasuk penolong kelahiran dan tempat melahirkan. Kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan juga semakin membaik pada periode 2021. Persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 92,72 persen pada tahun 2020, meningkat sebesar 2,72 poin pada tahun 2021 (95,44 persen). Sementara yang memilih tempat melahirkan di rumah dan lainnya pada tahun 2020 sebesar 7,28 persen, menurun 2,72 poin pada tahun 2021 (4,56 persen). Bahkan di beberapa kabupaten seperti Takalar, Sidenreng Rappang dan Kota Pare-pare memiliki persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 100 persen pada tahun 2021.

3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

Berdasarkan hasil olah Susenas September Maret 2017 – Maret 2021 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi baik dari jumlah maupun persentase. Pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebanyak 813,07 ribu jiwa atau 9,38 persen, naik menjadi 9,48 persen atau 825,97 ribu jiwa pada September 2017. Kemudian mengalami penurunan pada September 2019 menjadi sebesar 8,56 persen atau 759,58 ribu jiwa. Namun pada

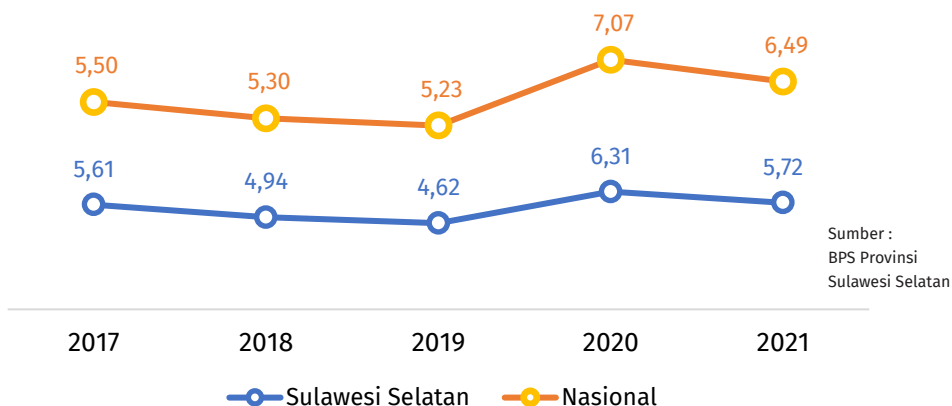
September 2020 persentase penduduk miskin kembali naik sebesar 8,99 persen atau sebanyak 800,24 ribu jiwa. Hingga pada periode Maret 2021 Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,78 persen atau sebanyak 784,98 ribu jiwa.



Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2017-2021

Tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan dan kembali turun pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,21 poin atau penduduk miskin berkurang sebesar 15,26 ribu jiwa.

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 yang dibandingkan dengan tahun 2020 sejalan dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional maka tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai 2021, sudah berhasil lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya salah satunya akibat dampak dari Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020.



Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus Tahun 2017-2021 (Persen)

BAB IV

Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

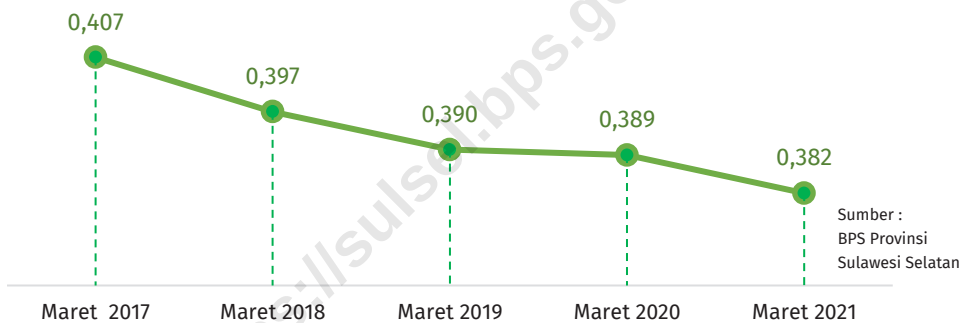
<https://sulsel.bps.go.id>

BAB IV

Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

4.1. Disparitas Antarindividu

Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi antar individu tidak dapat dihindari. Manusia adalah fokus utama dalam pembangunan manusia. Individu harus dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Sebagian penduduk dapat memperoleh pilihan-pilihannya, sementara yang lain berada dalam keterbatasan pilihan untuk mengakses sumber daya.

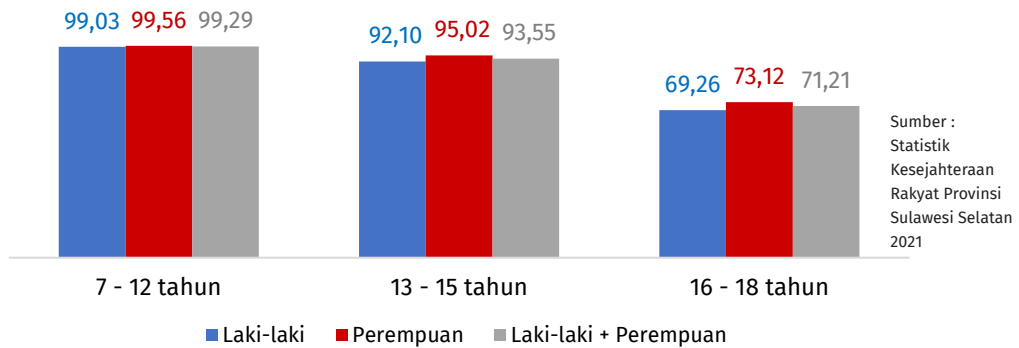


**Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan
Maret 2017 – Maret 2021**

Tingkat ketimpangan individu ditunjukkan oleh gini rasio. Gini rasio pengeluaran di Sulawesi Selatan menunjukkan ketimpangan di bidang ekonomi. Gini rasio di Sulawesi Selatan kondisi Maret 2021 mencapai 0,382. turun jika dibandingkan dengan Maret 2020. Namun hal ini masih menunjukkan ketimpangan antar individu yang masih melebar.

4.2. Disparitas Antargender

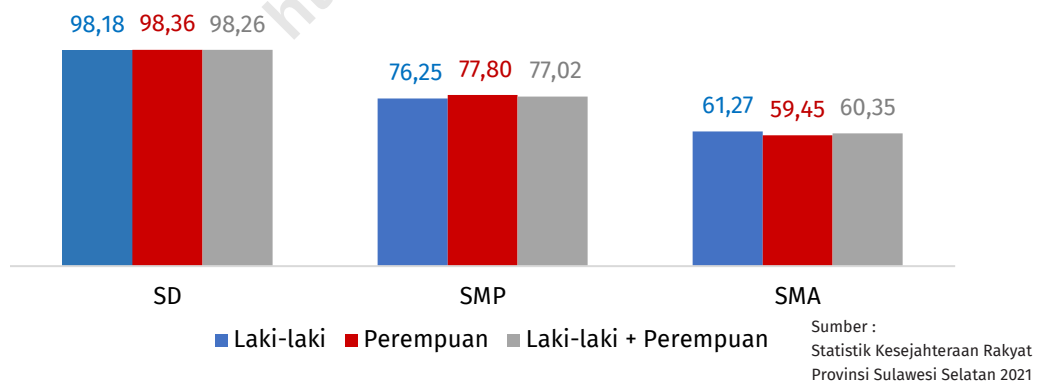
Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Ketimpangan gender dari sisi pendidikan masih terjadi saat ini. Beberapa indikator pendidikan telah mencatat capaian perempuan telah melampaui laki-laki diantaranya angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).



Gambar 4.2 Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Pada tahun 2021 APS dirinci menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2021 APS penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada semua jenjang usia.

Dari sisi Angka partisipasi murni tahun 2021 menunjukkan capaian partisipasi perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki pada jenjang pendidikan SMA. Sementara untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, Angka Partisipasi Murni laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Adapun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021 mencatat bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jika TPAK laki-laki tahun 2021 mencapai 81,03 persen, TPAK perempuan hanya mencapai 49,42 persen.



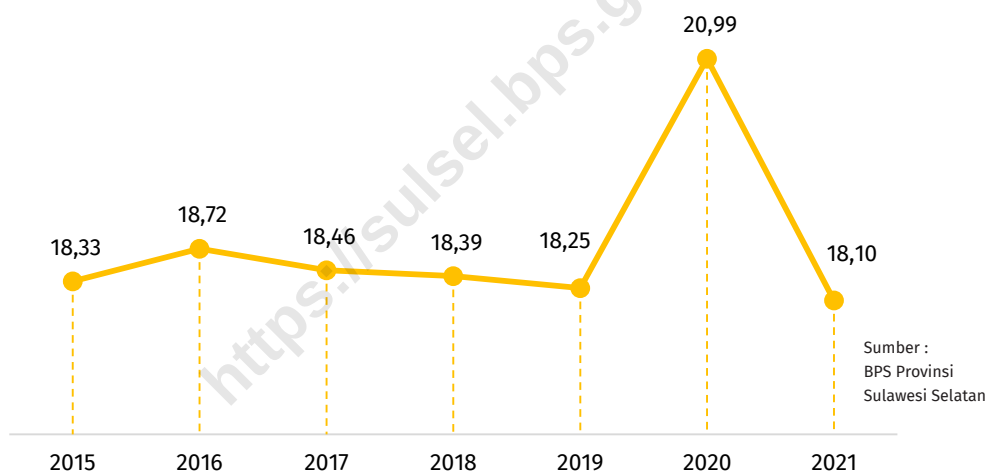
Gambar 4.3 Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (persen)

4.3. Disparitas Antawilayah

Sulawesi Selatan memiliki potensi penduduk dan wilayah yang sangat kaya. Namun, potensi yang dimiliki ini belum termanfaatkan secara optimal. Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Luas wilayah dan belum meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi. Baik antar perkotaan dan perdesaan, antar kabupaten dan antar kota dengan kabupaten.

Disparitas antar Kabupaten/Kota.

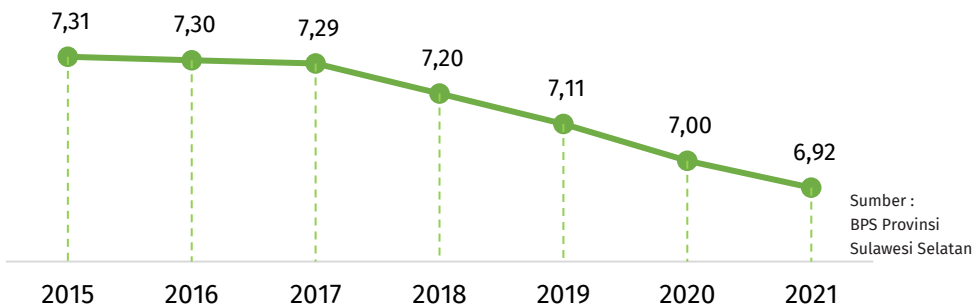
Disparitas antar kabupaten/kota terlihat dari capaian IPM Kota Makassar (IPM = 82,66) dengan Kabupaten Jeneponto (IPM = 64,56), pada tahun 2021. Selisih capaian IPM kedua kabupaten dan kota tersebut di tahun 2021 mencapai 18,10 poin.



Gambar 4.4 Selisih IPM Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2015-2021

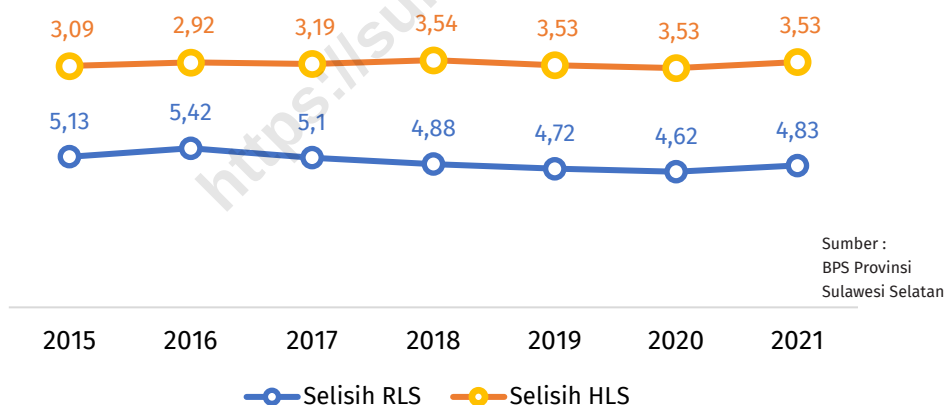
Jika diperhatikan trennya, selama tahun 2015 hingga 2021, perbedaan IPM kedua kabupaten/kota tersebut sempat meningkat di tahun 2020 namun kembali menurun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas antara kabupaten/kota makin besar selama pandemi covid-19.

Jika dilihat menurut dimensi penyusun IPM, pada dimensi kesehatan, capaian UHH tertinggi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Toraja Utara (73,41 tahun) dan terendah adalah Kabupaten Jeneponto (66,49 tahun). Selisih antara kedua wilayah ini mencapai 6,92 tahun pada tahun 2021. Jika diperhatikan tren selama periode 2015 hingga 2021, mulai menunjukkan adanya pengurangan kesenjangan.



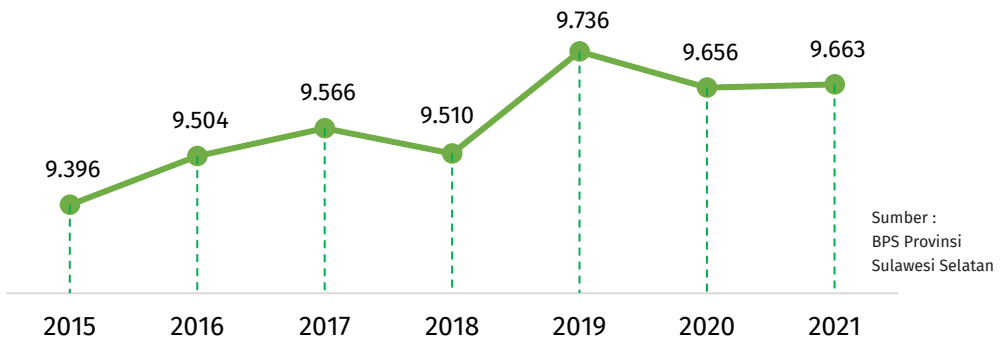
Gambar 4.5 Selisih Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Jeneponto, 2015-2021 (Tahun)

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kabupaten/kota. Pada komponen harapan lama sekolah (HLS) capaian tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Makassar dan terendah Kabupaten Bantaeng sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) capaian tertinggi pada Kota Makassar dan yang terendah pada Kabupaten Jeneponto. Selama periode tahun 2015 hingga 2021 tren menunjukkan kesenjangan yang menurun pada harapan lama sekolah. Sementara rata-rata lama sekolah memperlihatkan peningkatan kesenjangan di tahun 2021.



Gambar 4.6 Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2015-2021 (Tahun)

Pada dimensi ekonomi, yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, juga masih menunjukkan adanya disparitas antara kabupaten/kota. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2021 tertinggi adalah Kota Makassar dan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja.



Gambar 4.7 Selisih Pendapatan Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja, 2015-2021 (Ribu Rupiah)

Selama periode tahun 2015 hingga 2021 disparitas pada dimensi ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja cenderung semakin melebar. Diperlukan upaya-upaya yang tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

BAB V

Daya Beli Masyarakat

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB V

Daya Beli Masyarakat

5.1. Isu Pelemahan Daya Beli

Daya beli masyarakat Sulawesi Selatan dapat diukur dengan tingkat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap fluktuasi kegiatan ekonomi antarwaktu. Konsumsi saat ini mempengaruhi konsumsi di masa depan dan sebaliknya, prediksi tentang masa depan mempengaruhi konsumsi saat ini. Selanjutnya dalam jangka panjang, pola konsumsi dan tabungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang rendah pun masih mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Selain itu, konsumsi merupakan satu-satunya andalan dalam pertumbuhan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara pada masa pasca krisis.

Tabel 5.1 Distribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2018 - Q3 2021 (persen)

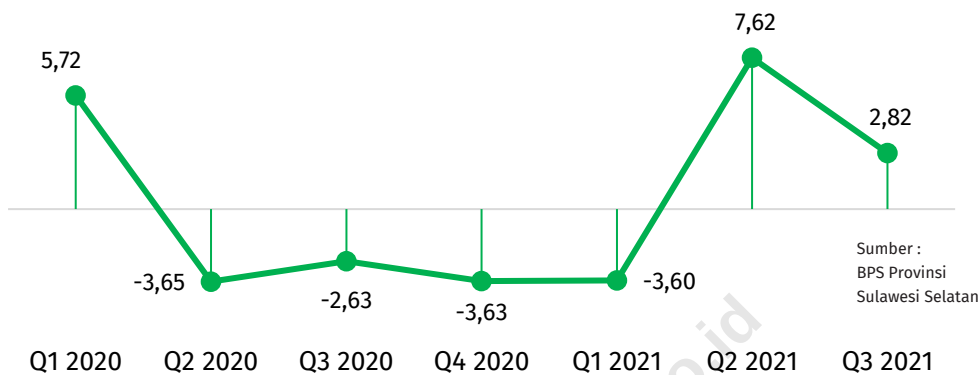
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021
Konsumsi rumah tangga	54,39	54,42	55,22	56,39	54,56	51,01
Konsumsi LNPRT	1,33	1,62	1,57	1,57	1,45	1,45
Konsumsi Pemerintah	9,71	9,80	9,64	6,28	10,78	8,70
PMTB	37,24	37,36	39,43	38,48	37,61	38,03
Perubahan Inventori	0,31	0,10	0,14	0,64	0,33	0,24
Ekspor	9,63	8,79	9,51	8,87	9,99	8,43
Impor	12,60	12,08	15,51	12,23	14,73	7,86
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Sulawesi Selatan selalu lebih dari 50 persen. Daya beli masyarakat yang meningkat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat kontribusinya yang sangat tinggi dibanding komponen PDRB lainnya.

Jika dicermati lebih lanjut untuk kondisi triwulanan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada triwulan I 2020, konsumsi rumah tangga di Sulawesi Selatan tumbuh mencapai 5,72 persen (jika dibandingkan triwulan I 2019),

kemudian kontraksi di triwulan berikutnya sebesar 3,65 persen, dimana triwulan ini merupakan puncak pandemi covid 19 dimana semua kegiatan dilaksanakan dirumah masing-masing, sampai pada triwulan 4 tahun 2020 kontraksinya makin dalam.

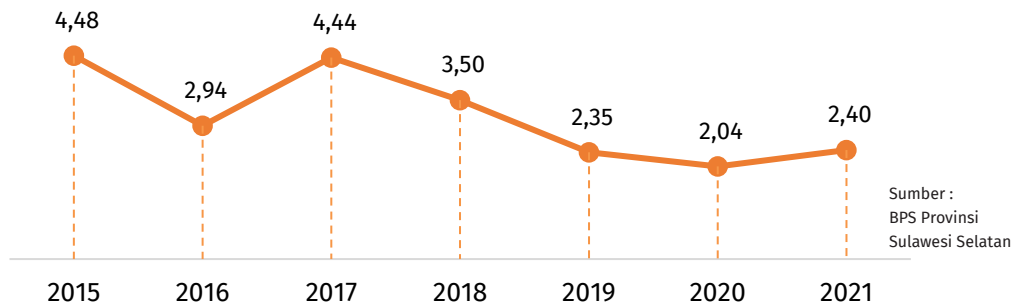


Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Sulawesi Selatan (y-on-y), 2020-2021 (persen)

5.2. Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli

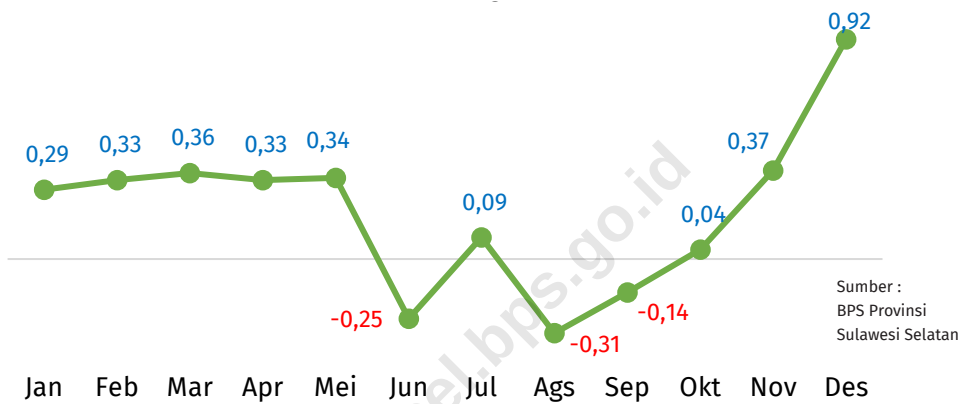
Keynes (1936) dalam Analisis Isu Terkini (BPS, 2017) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Kondisi daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

Daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan tidak mampu akan menurun apabila harga – harga barang terus naik di setiap kategori komoditas di pasar. Oleh sebab itu, inflasi dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi ril masyarakat.



Gambar 5.2 Laju Inflasi Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2015-2021

Gambar 5.2 menunjukkan tren laju inflasi gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2021. Laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah sebesar 2,40 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sepanjang tahun 2021 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 2,40 persen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2020 yang sebesar 2,04 persen, kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa tingkat kestabilan harga tahun 2021 tidak lebih baik dibanding dengan tahun 2020.



Gambar 5.3 Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2021

Angka inflasi bulanan dari gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2021 menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang tahun 2021 Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebanyak 9 kali dan deflasi sebanyak 3 kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,92 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan Oktober 2021 sebesar 0,04 persen. Penyebab utama kenaikan inflasi pada bulan Desember adalah naiknya harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,36 persen, kelompok Transportasi sebesar 1,58 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,11 persen pada bulan tersebut.

Di sisi lain, deflasi terdalam pada tahun 2021 terjadi pada bulan Agustus 2021 sebesar -0,31 persen. Penyebab utamanya terjadinya deflasi adalah turunnya harga pada dua kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar -0,33 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,07 persen.

Berdasarkan hasil gambaran indikator pengukuran daya beli masyarakat (pengeluaran konsumsi rumah tangga) dan faktor yang diduga mempengaruhi daya beli masyarakat (laju inflasi) memberikan gambaran efek yang searah yang artinya bahwa pertumbuhan PKRT selama tahun 2021 mengalami fluktuatif dan inflasi tahunan juga lebih tinggi di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara Inflasi bulanan berfluktuasi dan cenderung meningkat terutama mendekati periode akhir tahun. Meski tim pengendali inflasi sudah cukup bekerja, namun kenyataannya terjadi deflasi di triwulan 2 dan 3, serta pertumbuhan PKRT yang melambat pada triwulan 3 tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya keselarsan antara perlambatan pertumbuhann PKRT dengan deflasi akibat pandemi covid-19 yang maknanya, turunnya harga (deflasi) terjadi karena rendahnya permintaan/konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan pada periode tersebut.

Lampiran

Lampiran 1

Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7301	Selayar	67,50	67,70	67,76	67,82	68,03	68,34	68,46	68,52
7302	Bulukumba	66,43	66,73	66,84	66,96	67,27	67,69	67,92	68,10
7303	Bantaeng	69,68	69,77	69,84	69,90	70,11	70,42	70,54	70,60
7304	Jeneponto	65,39	65,49	65,57	65,65	65,89	66,24	66,39	66,49
7305	Takalar	65,90	66,20	66,29	66,38	66,64	67,01	67,18	67,30
7306	Gowa	69,78	69,88	69,92	69,95	70,11	70,37	70,43	70,45
7307	Sinjai	66,36	66,46	66,54	66,61	66,83	67,17	67,30	67,38
7308	Maros	68,50	68,55	68,58	68,60	68,74	68,98	69,02	69,04
7309	Pangkajene Kepulauan	65,37	65,67	65,77	65,86	66,12	66,49	66,66	66,78
7310	Barrau	67,73	68,03	68,16	68,30	68,60	68,91	69,02	69,07
7311	Bone	65,81	66,01	66,12	66,22	66,50	66,88	67,07	67,21
7312	Soppeng	68,42	68,52	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65	69,81
7313	Wajo	65,93	66,23	66,38	66,52	66,79	67,17	67,35	67,48
7314	Sidenreng Rappang	68,07	68,57	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83	70,01
7315	Pinrang	68,03	68,43	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77
7316	Enrekang	70,21	70,31	70,34	70,38	70,55	70,83	70,91	70,93
7317	Luwu	69,14	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19	70,34	70,44
7318	Tana Toraja	72,11	72,41	72,48	72,56	72,80	73,15	73,30	73,40
7322	Luwu Utara	67,00	67,40	67,50	67,61	67,90	68,31	68,51	68,67
7325	Luwu Timur	69,44	69,64	69,71	69,79	70,03	70,38	70,53	70,63
7326	Toraja Utara	72,50	72,80	72,87	72,94	73,09	73,35	73,39	73,41
7371	Kota Makassar	71,38	71,47	71,49	71,51	71,70	72,00	72,09	72,13
7372	Kota ParePare	70,39	70,59	70,64	70,69	70,88	71,18	71,27	71,31
7373	Kota Palopo	70,12	70,20	70,25	70,30	70,49	70,79	70,88	70,92
7300	Sulawesi Selatan	69,60	69,80	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57	70,66

Lampiran 2

Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Expected Years of Schooling (EYS)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7301	Selayar	11,98	12,29	12,44	12,45	12,46	12,48	12,65	12,66
7302	Bulukumba	12,31	12,32	12,64	12,65	12,79	12,91	13,17	13,41
7303	Bantaeng	11,48	11,67	11,88	11,99	12,01	12,03	12,04	12,05
7304	Jeneponto	11,68	11,70	11,77	11,93	11,95	11,97	11,98	12,10
7305	Takalar	11,31	11,61	12,00	12,21	12,22	12,25	12,41	12,42
7306	Gowa	12,45	12,74	13,03	13,04	13,29	13,48	13,64	13,65
7307	Sinjai	11,96	12,34	12,83	12,84	12,85	12,87	13,05	13,06
7308	Maros	12,37	12,67	12,96	12,97	12,99	13,02	13,04	13,16
7309	Pangkajene Kepulauan	12,37	12,38	12,39	12,40	12,41	12,51	12,76	12,77
7310	Barru	13,45	13,53	13,54	13,55	13,56	13,57	13,58	13,59
7311	Bone	12,16	12,41	12,42	12,43	12,67	12,80	12,88	12,98
7312	Soppeng	11,45	11,81	12,20	12,33	12,57	12,73	12,90	13,05
7313	Wajo	13,05	13,07	13,08	13,09	13,11	13,13	13,14	13,15
7314	Sidenreng Rappang	12,80	12,88	12,89	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95
7315	Pinrang	13,16	13,17	13,18	13,19	13,20	13,22	13,23	13,24
7316	Enrekang	13,29	13,30	13,65	13,66	13,68	13,69	13,70	13,71
7317	Luwu	12,87	12,88	13,27	13,28	13,30	13,32	13,33	13,39
7318	Tana Toraja	12,89	13,23	13,24	13,25	13,50	13,58	13,80	13,86
7322	Luwu Utara	12,09	12,11	12,33	12,38	12,39	12,42	12,43	12,57
7325	Luwu Timur	11,95	12,36	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83	12,84
7326	Toraja Utara	12,61	12,95	13,33	13,34	13,35	13,37	13,38	13,39
7371	Kota Makasar	14,75	14,76	14,80	15,18	15,55	15,56	15,57	15,58
7372	Kota ParePare	14,04	14,44	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50	14,51
7373	Kota Palopo	15,01	15,02	15,03	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09
7300	Sulawesi Selatan	12,90	12,99	13,16	13,28	13,34	13,36	13,45	13,52

Lampiran 3

Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Mean Years of Schooling (MYS)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7301	Selayar	7,10	7,16	7,17	7,18	7,40	7,63	7,88	8,08
7302	Bulukumba	6,66	6,68	6,86	7,16	7,34	7,43	7,67	7,82
7303	Bantaeng	6,16	6,16	6,17	6,45	6,47	6,48	6,72	6,77
7304	Jeneponto	5,63	5,64	5,65	5,98	6,21	6,48	6,59	6,60
7305	Takalar	6,57	6,57	6,64	6,77	6,91	7,18	7,29	7,49
7306	Gowa	6,99	7,24	7,52	7,74	7,75	7,97	8,19	8,20
7307	Sinjai	7,03	7,05	7,06	7,28	7,29	7,48	7,75	7,78
7308	Maros	7,17	7,19	7,20	7,42	7,43	7,46	7,73	8,01
7309	Pangkajene Kepulauan	7,31	7,32	7,33	7,48	7,49	7,60	7,66	7,92
7310	Barrau	7,28	7,60	7,61	7,85	7,86	7,96	8,23	8,24
7311	Bone	6,11	6,55	6,76	6,77	6,97	6,98	7,15	7,23
7312	Soppeng	7,04	7,05	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81	7,82
7313	Wajo	6,36	6,37	6,38	6,78	6,79	6,80	6,81	7,05
7314	Sidenreng Rappang	7,30	7,32	7,33	7,52	7,79	7,83	7,84	7,94
7315	Pinrang	7,45	7,47	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87
7316	Enrekang	7,98	8,05	8,06	8,43	8,68	8,89	8,90	8,91
7317	Luwu	7,60	7,74	7,75	7,89	7,97	8,15	8,24	8,35
7318	Tana Toraja	7,81	7,91	7,92	7,93	7,94	8,02	8,26	8,51
7322	Luwu Utara	7,19	7,38	7,39	7,52	7,53	7,78	7,79	7,86
7325	Luwu Timur	7,80	7,87	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80	8,81
7326	Toraja Utara	7,70	7,71	7,72	7,73	7,76	7,92	7,96	8,25
7371	Kota Makassar	10,64	10,77	11,07	11,08	11,09	11,20	11,21	11,43
7372	Kota ParePare	9,95	10,01	10,02	10,09	10,29	10,30	10,45	10,65
7373	Kota Palopo	9,96	10,25	10,26	10,33	10,51	10,75	10,76	10,94
7300	Sulawesi Selatan	7,49	7,64	7,75	7,95	8,02	8,26	8,38	8,46

Lampiran 4

Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021 (Ribu Rupiah)

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7301	Selayar	7.656	7.793	8.123	8.436	8.666	9.028	8.970	9.060
7302	Bulukumba	9.618	9.777	10.040	10.217	10.331	10.480	10.513	10.632
7303	Bantaeng	10.294	10.467	10.596	10.751	11.153	11.592	11.632	11.829
7304	Jeneponto	8.417	8.489	8.559	8.747	8.957	9.078	9.114	9.215
7305	Takalar	9.351	9.423	9.759	9.845	10.134	10.474	10.454	10.543
7306	Gowa	8.515	8.578	8.717	9.009	9.179	9.369	9.394	9.504
7307	Sinjai	8.272	8.433	8.706	8.816	9.098	9.465	9.439	9.505
7308	Maros	9.355	9.468	9.758	10.121	10.558	10.981	10.963	11.032
7309	Pangkajene Kepulauan	10.161	10.517	10.670	10.837	11.197	11.392	11.405	11.519
7310	Barru	9.733	9.811	10.155	10.285	10.622	10.911	10.923	11.017
7311	Bone	7.845	7.930	8.275	8.470	8.686	8.954	8.963	9.030
7312	Soppeng	8.699	8.835	8.965	9.035	9.291	9.444	9.483	9.558
7313	Wajo	10.778	11.047	11.681	11.770	12.057	12.399	12.386	12.505
7314	Sidenreng Rappang	10.434	11.004	11.368	11.523	11.834	12.039	12.073	12.201
7315	Pinrang	10.680	10.791	10.899	11.279	11.508	11.828	11.844	11.956
7316	Enrekang	9.347	9.818	10.188	10.359	10.683	10.800	10.844	10.973
7317	Luwu	8.764	9.160	9.301	9.381	9.705	10.085	10.014	10.116
7318	Tana Toraja	6.214	6.273	6.509	6.801	7.087	7.253	7.217	7.434
7322	Luwu Utara	10.605	10.697	10.786	11.101	11.429	11.583	11.562	11.736
7325	Luwu Timur	11.859	11.926	11.960	12.030	12.346	12.802	12.814	12.886
7326	Toraja Utara	6.955	7.033	7.228	7.457	7.783	8.083	8.097	8.134
7371	Kota Makassar	15.079	15.669	16.013	16.367	16.597	16.989	16.873	17.097
7372	Kota ParePare	12.692	12.817	12.966	13.078	13.303	13.648	13.663	13.786
7373	Kota Palopo	11.713	12.005	12.156	12.319	12.662	12.986	12.995	13.117
7300	Sulawesi Selatan	9.723	9.992	10.281	10.489	10.814	11.118	11.079	11.184

Lampiran 5

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2021

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7301	Selayar	63,66	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91	67,38	67,76
7302	Bulukumba	65,24	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28	68,99	69,62
7303	Bantaeng	65,77	66,20	66,59	67,27	67,76	68,30	68,73	68,99
7304	Jeneponto	61,45	61,61	61,81	62,67	63,33	64,00	64,26	64,56
7305	Takalar	63,53	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94	67,31	67,72
7306	Gowa	66,12	66,87	67,70	68,33	68,87	69,66	70,14	70,29
7307	Sinjai	63,83	64,48	65,36	65,80	66,24	67,05	67,60	67,75
7308	Maros	66,65	67,13	67,76	68,42	68,94	69,50	69,86	70,41
7309	Pangkajene Kepulauan	66,16	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29	68,72	69,21
7310	Barrau	67,94	68,64	69,07	69,56	70,05	70,60	71,00	71,13
7311	Bone	62,09	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67	66,06	66,40
7312	Soppeng	64,74	65,33	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67	68,99
7313	Wajo	66,49	66,90	67,52	68,18	68,57	69,05	69,15	69,62
7314	Sidenreng Rappang	68,14	69,00	69,39	69,84	70,60	71,05	71,21	71,54
7315	Pinrang	68,92	69,24	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26	71,45
7316	Enrekang	69,37	70,03	70,79	71,44	72,15	72,66	72,76	72,91
7317	Luwu	67,34	68,11	68,71	69,02	69,60	70,39	70,51	70,85
7318	Tana Toraja	65,08	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25	68,75	69,49
7322	Luwu Utara	66,90	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46	69,57	70,02
7325	Luwu Timur	69,75	70,43	70,95	71,46	72,16	72,80	73,22	73,34
7326	Toraja Utara	66,15	66,76	67,49	67,90	68,49	69,23	69,33	69,75
7371	Kota Makassar	79,35	79,94	80,53	81,13	81,73	82,25	82,25	82,66
7372	Kota Parepare	75,66	76,31	76,48	76,68	77,19	77,62	77,86	78,21
7373	Kota Palopo	75,65	76,27	76,45	76,71	77,30	77,98	78,06	78,38
7300	Sulawesi Selatan	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24

Lampiran 6

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2014-2021

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18
Sumatera Utara	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00
Sumatera Barat	69,36	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65
Riau	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94
Jambi	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63
Sumatera Selatan	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24
Bengkulu	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64
Lampung	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90
Kep. Bangka Belitung	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69
Kepulauan Riau	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79
DKI Jakarta	78,39	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11
Jawa Barat	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45
Jawa Tengah	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
DI Yogyakarta	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22
Jawa Timur	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
Banten	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72
Bali	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69
Nusa Tenggara Barat	64,32	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65
Nusa Tenggara Timur	62,26	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28
Kalimantan Barat	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90
Kalimantan Tengah	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25
Kalimantan Selatan	67,63	68,38	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28
Kalimantan Timur	73,82	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88
Kalimantan Utara	68,64	68,76	69,20	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19
Sulawesi Utara	69,96	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30
Sulawesi Tengah	66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79
Sulawesi Selatan	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24
Sulawesi Tenggara	68,07	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66
Gorontalo	65,17	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00
Sulawesi Barat	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36
Maluku	66,74	67,05	67,60	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71
Maluku Utara	65,18	65,91	66,63	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76
Papua Barat	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26
Papua	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62
Indonesia	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Lampiran 7

Tren Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2020-2021

Provinsi	UHH		HLS		RLS		PPP	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Aceh	69,93	69,96	14,31	14,36	9,33	9,37	9.492	9.572
Sumatera Utara	69,10	69,23	13,23	13,27	9,54	9,58	10.420	10.499
Sumatera Barat	69,47	69,59	14,02	14,09	8,99	9,07	10.733	10.790
Riau	71,60	71,67	13,20	13,28	9,14	9,19	10.675	10.736
Jambi	71,16	71,22	12,98	13,04	8,55	8,60	10.392	10.588
Sumatera Selatan	69,88	69,98	12,45	12,54	8,24	8,30	10.652	10.662
Bengkulu	69,35	69,42	13,61	13,67	8,84	8,87	10.380	10.487
Lampung	70,65	70,73	12,65	12,73	8,05	8,08	9.982	10.038
Kep. Bangka Belitung	70,64	70,73	12,05	12,17	8,06	8,08	12.794	12.819
Kepulauan Riau	69,96	70,12	12,87	12,98	10,12	10,18	14.209	14.122
DKI Jakarta	72,91	73,01	12,98	13,07	11,13	11,17	18.227	18.520
Jawa Barat	73,04	73,23	12,50	12,61	8,55	8,61	10.845	10.934
Jawa Tengah	74,37	74,47	12,70	12,77	7,69	7,75	10.930	11.034
DI Yogyakarta	74,99	75,04	15,59	15,64	9,55	9,64	14.015	14.111
Jawa Timur	71,30	71,38	13,19	13,36	7,78	7,88	11.601	11.707
Banten	69,96	70,02	12,89	13,02	8,89	8,93	11.964	12.033
Bali	72,13	72,24	13,33	13,40	8,95	9,06	13.929	13.820
Nusa Tenggara Barat	66,51	66,69	13,70	13,90	7,31	7,38	10.351	10.377
Nusa Tenggara Timur	67,01	67,15	13,18	13,20	7,63	7,69	7.598	7.554
Kalimantan Barat	70,69	70,76	12,60	12,65	7,37	7,45	8.930	8.974
Kalimantan Tengah	69,74	69,79	12,66	12,74	8,59	8,64	11.154	11.182
Kalimantan Selatan	68,66	68,83	12,68	12,81	8,29	8,34	12.032	12.143
Kalimantan Timur	74,33	74,61	13,72	13,81	9,77	9,84	11.728	12.116
Kalimantan Utara	72,59	72,65	12,93	12,94	9,00	9,11	8.756	9.075
Sulawesi Utara	71,69	71,76	12,85	12,94	9,49	9,62	10.791	10.882
Sulawesi Tengah	68,69	68,83	13,17	13,23	8,83	8,89	9.335	9.378
Sulawesi Selatan	70,57	70,66	13,45	13,52	8,38	8,46	11.079	11.184
Sulawesi Tenggara	71,22	71,27	13,65	13,68	9,04	9,13	9.331	9.381
Gorontalo	68,07	68,19	13,08	13,11	7,82	7,90	10.020	10.157
Sulawesi Barat	65,06	65,25	12,77	12,86	7,89	7,96	9.168	9.153
Maluku	65,98	66,09	13,96	13,97	9,93	10,03	8.732	8.770
Maluku Utara	68,33	68,45	13,67	13,68	9,04	9,09	8.032	8.140
Papua Barat	66,02	66,14	12,91	13,13	7,60	7,69	8.086	7.929
Papua	65,79	65,93	11,08	11,11	6,69	6,76	6.954	6.955
Indonesia	71,47	71,57	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id